

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

LULU CHODLIROTUL AROFAH

B200090090

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

Yang disusun oleh:

LULU CHODLIROTUL AROFAH

B200090090

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Februari 2018

Pembimbing



Drs. M. Abdul Aris, M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Drs. H. Syamsudin, MM

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Yang ditulis oleh:

LULU CHODLIROTUL AROFAH

B200090090

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 06 Februari 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. M. Abdul Aris, M.Si.

(Penguji 1)

()

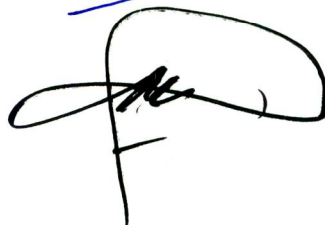
2. Dra. Erma Setiawati, MM

(Penguji 2)

()

3. Drs. Atwal Arifin, M.Si, Akt

(Penguji 3)

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta





Syamsudin, SE., M.Si.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuansaya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Februari 2018

Pehulis



LULU CHODLIROTUL AROFAH
B200090090

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan perkapita, jumlah penduduk, jumlah hotel dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk menganalisis faktor-faktor paling dominan yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sumber data yang digunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan perkapita terhadap Pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. 2) Ada pengaruh negatif dan signifikan jumlah penduduk terhadap Pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. 3) Tidak ada pengaruh positif dan signifikan jumlah hotel terhadap Pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. 4) Ada pengaruh positif signifikan jumlah industri terhadap Pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. 5) Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh kesimpulan bahwa variabel yang dominan pengaruhnya terhadap Pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah adalah pendapatan perkapita.

Kata Kunci: *pendapatan perkapita, jumlah penduduk, jumlah hotel, jumlah industri dan penerimaan pajak daerah*

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to find out the influence of variable income per capita, the number of inhabitants, the number of hotels and the amount of the tax receipt against the industrial areas in the counties and cities in Central Java province. To analyze the most dominant factors affecting tax revenue areas in counties and cities in Central Java province this research using quantitative research types, the data type used is the quantitative data, the data source used secondary data. The data collection method used is the documentation obtained from the Central Bureau of statistics (BPS) are regencies and cities in Central Java. Technique of data analysis used a classic assumption test, and multiple linear regression analysis. The research results obtained conclusions that: 1) there is a significant and positive influence on per-capita income against tax areas in the County and the city of Central Java province. 2) there is a negative influence and significant population against tax areas in the County and the city of Central Java province. 3) no positive influence and significant number of hotel tax areas in the counties and Cities of Central Java province. 4) there are a number of significant positive influence on the industry against tax areas in the County and the city of Central Java province. 5) multiple linear regression analysis results obtained

conclusions that dominant variables that affect tax areas in the Regency of Central Java province and the city is the per-capita income.

Keywords: income per capita, the number of inhabitants, the number of hotels, the number of industries and regional tax revenues

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah kegiatan pembangunan masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat materiil maupun spiritual. Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk mengembangkan daerah yang semakin berat dan kompleks dalam menghadapi era globalisasi untuk meningkatkan kemampuan daerah tersebut. Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kebijakan otonomi daerah secara resmi diperlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 januari 2001 oleh pemerintah pusat. Dengan munculnya otonomi daerah di Indonesia diperlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah diberi kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan mengeratkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saling berhubungan erat. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan agar pemerintah mampu menjalankan rumah tangganya untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komponen pendapatan daerah yang dapat diandalkan salah satunya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak merupakan salah satu sumber terbesar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sesuai peraturan hukum dan perundang-undangan yang jelas dan kuat untuk membiayai pembangunan daerah. Peranan pajak daerah menjadi sangat penting dalam pembiayaan daerah yang dapat menjadi sumber pendanaan daerah dan penyangga utama dalam kegiatan-kegiatan daerahnya. Pajak daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar. Dengan kontribusi pajak daerah yang semakin besar, maka akan semakin leluasa dalam memanfaatkan dana yang diperoleh dan akan menambah kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta semakin tinggi kualitas otonominya.

Berdasarkan data yang diperoleh pada BPS Jawa Tengah tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa pajak daerah pada masing-masing Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah terjadi ketimpangan, hal ini berakibat pada pembangunan antar daerah tidak merata. Hal ini ditunjukkan dengan pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016 diperoleh nilai terendah sebesar Rp. 23.587.802,00 juta terjadi pada Kota Magelang Tahun 2016, pajak daerah tertinggi yaitu sebesar Rp. 858764751,00 juta terjadi pada Kota Semarang tahun 2016.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah antar kabupaten kota di Jawa Tengah mengalami gap yang sangat besar antara kabupaten/kota yang satu dengan yang kabupaten/kota yang lainnya. Pendapatan perkapita merupakan besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu kota ataupun negara, yang diperoleh dari pembagian pendapatan nasional dengan jumlah penduduk.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan perkapita dari tahun 2015-2016 menggambarkan bahwa pendapatan penduduk dari berbagai sektor konsumsi selalu meningkat, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap

penerimaan pajak di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penjelasan tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfiyah (2015) dan Muhammad Tahwin (2013) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Penduduk merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun nasional. Jumlah penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Tingkat kepadatan jumlah penduduk yang tinggi pada suatu daerah akan berpengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak air dan tanah. Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfiyah (2015) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak reklame. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tahwin (2013) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Penelitian Phany Ineke Putri (2013) juga menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

Jumlah industri adalah jumlah usaha industri kecil, menengah, maupun besar yang berbasis agro dan non agro. Jumlah industri akan meramalkan perubahan yang terjadi dalam suatu daerah sehingga industri akan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan keuntungan mereka. Ketika semua faktor penentuan lokasi telah terpenuhi maka industri akan melakukan kegiatan industri di daerah tersebut. Jumlah industri yang meningkat sangat berpengaruh dengan pendapatan pajak itu sendiri, hal ini disebabkan industri yang melakukan kegiatan usaha akan mengurus perijinan, sehingga bertambahnya jumlah industri yang mengurus ijin usaha mengakibatkan penerimaan pajak daerahpun meningkat. Hal tersebut didukung hasil penelitian Arshad Darulmalshah Tamara (2009) dan Ulfiyah (2015) menyatakan bahwa jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

Potensi yang dimiliki Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu sumber untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Besarnya penerimaan pajak daerah tergantung pada kesiapan dan potensi yang dimiliki daerah. Disamping itu, peran masyarakat sangat membantu dalam

meningkatkan Pajak Daerah. Banyaknya media yang dapat digunakan masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah harus digali secara aktif dan kreatif.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan perkapita, jumlah penduduk, jumlah hotel dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk menganalisis faktor-faktor paling dominan yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sumber data yang digunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

2.1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Daerah. Yang termasuk penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Data diambil dari laporan realisasi pendapatan daerah tahun 2015-2016 yang di dapat dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Kas dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Variabel penerimaan pajak daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio satuan rupiah.

2.2. Variabel Independen

2.2.1. Pendapatan Perkapita (PPK)

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa

Tengah. Data diambil dari buku Surakarta dalam angka yang diterbitkan oleh Bps Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2016. Variabel pendapatan perkapita dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio rupiah.

2.2.2. Jumlah Penduduk (PDK)

Penduduk merupakan kumpulan manusia yang menempati wilayah dan ruang tertentu. Penduduk merupakan salah satu modal awal dalam perkembangan ekonomi. Pertumbuhan atau penambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat kelahiran dan urbanisasi. Jumlah penduduk yaitu jumlah manusia yang menempati wilayah di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Data diambil dari buku Surakarta dalam angka yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2016. Variabel jumlah penduduk dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio satuan jiwa.

2.2.3. Jumlah Hotel (HTL)

Jumlah Hotel adalah unit hotel berupa bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat menginap dan makan orang yang sedang dalam perjalanan di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Jumlah hotel yang tercatat di Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dihitung dengan satuan unit.

2.2.4. Jumlah Industri (IDS)

Jumlah Industri Adalah jumlah usaha industri baik industri kecil, menengah maupun besar yang ada di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Data diambil dari buku Surakarta dalam angka yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Variabel jumlah industri dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio satuan unit.

2.3. Teknik analisis data menggunakan:

2.3.1. Uji Asumsi Klasik

- 1). Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Varians Inflation Factor (VIF)* yang dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS.
- 2). Uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Run* bertujuan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak.
- 3). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.
- 4). Uji normalitas atas residual dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* melalui alat bantu komputer program SPSS 21.

2.3.2. Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Multikolinearitas	Tolerance (0,455); (0,721); (0,894); > 0,1 VIF (2,200); (1,387); (1,119) < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji Autokorelasi	P (0,087) > 0,05	Tidak terjadi autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	P (0,182); (0,740); (0,795); (0,498) > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji Normalitas	p (0,896) > 0,05	Residual normal

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

3.2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu pendapatan perkapita (PPK), jumlah penduduk (PDK), jumlah hotel (HTL) dan jumlah industri (IDS) terhadap variabel terikat yaitu pajak daerah (PPD).

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Sig.	Hasil
LNPDRB	0,817	0,000	H2 diterima
LNPDDK	-0,233	0,029	H2 diterima
LNHOTEL	0,125	0,020	H2 diterima
LNIND	0,126	0,016	H2 diterima

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:

$$PPD = 10,286 + 0,817PPK - 0,233PDK + 0,125HTL + 0,126IDS + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah :

- a : 10,286 artinya jika pendapatan perkapita (PPK), jumlah penduduk (PDK), jumlah hotel (HTL) dan jumlah industri (IDS) sama dengan nol, maka pajak daerah (PPD) adalah positif sebesar Rp. 10,286.
- b₁ : 0,817 artinya pengaruh variabel pendapatan perkapita (PPK) terhadap pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah positif, artinya apabila pendapatan perkapita meningkat sebesar satu rupiah, maka dapat meningkatkan pajak daerah sebesar Rp. 0,817, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.
- b₂ : -0,233 artinya pengaruh variabel jumlah penduduk (PDK) terhadap pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah negatif, artinya apabila jumlah penduduk meningkat sebanyak satu jiwa, maka dapat menurunkan pajak daerah sebesar Rp. 0,233, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.
- b₃ : 0,125 artinya pengaruh variabel jumlah hotel (HTL) terhadap pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah positif, artinya apabila

jumlah hotel meningkat sebanyak satu unit, maka dapat meningkatkan pajak daerah sebesar Rp. 0,125, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

b_4 : 0,126 artinya pengaruh variabel jumlah industri (IDS) terhadap pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah positif, artinya apabila jumlah industri meningkat sebanyak satu unit, maka dapat meningkatkan pajak daerah sebesar Rp. 0,126, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

3.3.Uji t

- 1) Pengujian signifikansi pengaruh pendapatan perkapita (PPK) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 6,883 dengan *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan perkapita (PPK) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan perkapita terhadap Pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.

- 2) Pengujian signifikansi pengaruh jumlah penduduk (PDK) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar -2,41 dengan *probability value* sebesar $0,029 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif dan signifikan Jumlah penduduk (PDK) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif dan signifikan jumlah penduduk terhadap pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.

- 3) Pengujian signifikansi pengaruh jumlah hotel (HTL) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,389 dengan *probability value* sebesar $0,020 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan

signifikan jumlah hotel (HTL) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan jumlah hotel terhadap Pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.

- 4) Pengujian signifikansi pengaruh jumlah industri (IDS) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,467 dengan *probability value* sebesar $0,016 < 0,05$ maka H_0 diterima berarti ada pengaruh yang positif tidak signifikan jumlah industri (IDS) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan jumlah industri terhadap pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah”, tidak terbukti kebenarannya.

3.4.Uji F

Hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 34,069 dengan *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pendapatan perkapita (PPK), Jumlah penduduk (PDK), jumlah hotel (HTL) dan jumlah industri (IDS) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang signifikan pendapatan perkapita, Jumlah penduduk, jumlah hotel dan jumlah industri secara simultan terhadap Pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.

3.5.Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,664 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu pendapatan perkapita (PPK), jumlah penduduk (PDK), jumlah hotel (HTL) dan jumlah industri (IDS) terhadap variabel terikat yaitu Pajak daerah (PPD) di Kabupaten

dan Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,4% sedangkan sisanya ($100\% - 66,4\%$) = 33,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

3.6.Pembahasan

3.6.1. Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Pajak Daerah

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 6,880 dengan *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan perkapita (PPK) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan perkapita terhadap Pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.

Hal tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa pengaruh pendapatan perkapita terhadap pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan, artinya tingginya pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya. Atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendapatan perkapitanya maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfyah (2015) dan Muhammad Tahwin (2013) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

3.6.2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar -2,241 dengan *probability value* sebesar $0,029 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif dan signifikan Jumlah penduduk (PDK) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif dan signifikan jumlah penduduk terhadap pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.

Hal tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa pengaruh jumlah penduduk terhadap pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan, artinya pertumbuhan penduduk dalam suatu daerah akan menjadi beban pemerintah daerah, karena memicu angka pengangguran dan pengeluaran subsidi. Jumlah penduduk yang

bukan merupakan angkatan kerja tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian, karena pemerintah daerah harus memberikan subsidi, baik subsidi bidang pendidikan maupun subsidi bidang kesehatan dan sosial. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar, sehingga semakin besar jumlah penduduk dalam suatu daerah berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfiyah (2015) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak reklame. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tahwin (2013) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Penelitian Phany Ineke Putri (2013) juga menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

3.6.3. Pengaruh Jumlah hotel terhadap Pajak Daerah

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,389 dengan *probability value* sebesar $0,020 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan jumlah hotel (HTL) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan jumlah hotel terhadap Pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.

Hal ini dapat peneliti jelaskan bahwa pengaruh jumlah hotel terhadap pajak daerah adalah positif dan signifikan, hal ini menandakan bahwa keberadaan jumlah hotel yang ada di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah berdampak terhadap peningkatan penerimaan jumlah pajak daerah yang dipungut dari aktivitas kunjungan wisatawan, hal ini menandakan bahwa dalam suatu daerah yang memiliki jumlah hotel yang tinggi menandakan bahwa potensi wisata yang ada di Kabupaten/Kota tersebut cukup banyak, sehingga berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pajak daerah.

3.6.4. Pengaruh Jumlah Industri terhadap Pajak Daerah

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,467 dengan *probability value* sebesar $0,016 < 0,05$ maka H_0 diterima berarti ada pengaruh yang positif signifikan jumlah industri (IDS) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan jumlah industri terhadap pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.

Hal tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa pengaruh jumlah industri terhadap pajak daerah berpengaruh positif signifikan, artinya adanya pembangunan industri akan memacu dan mengangkat pembangunan-pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan jasa, misalnya pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor pasar pun berkembang karena adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran atau periklanan, dan sebagainya, yang kesemuanya itu nanti akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Pembangunan industri menyebabkan meluasnya peluang kerja yang pada hakekatnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya belinya) tersebut menunjukkan bahwa perekonomian itu tumbuh.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Arshad Darulmalshah Tamara (2009) dan Ulfiyah (2015) menyatakan bahwa jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan perkapita (PPK) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut ditunjukkan nilai t hitung sebesar 6,883 dengan *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$.

- 2) Ada pengaruh negatif dan signifikan jumlah penduduk (PDK) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut ditunjukkan nilai t hitung sebesar -2,241 dengan *probability value* sebesar $0,029 < 0,05$.
- 3) Tidak ada pengaruh positif dan signifikan jumlah hotel (HTL) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut ditunjukkan nilai t hitung sebesar 2,389 dengan *probability value* sebesar $0,020 < 0,05$.
- 4) Ada pengaruh positif signifikan jumlah industri (IDS) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut ditunjukkan nilai t hitung sebesar 2,467 dengan *probability value* sebesar $0,016 > 0,05$.
- 5) Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh kesimpulan bahwa variabel yang dominan pengaruhnya terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah adalah pendapatan perkapita, karena nilai t hitung pendapatan perkapita 6,883 lebih besar diantara variabel-variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Abut, Hilarius. 2005. *Perpajakan*. Jakarta: Diadit Media.
- Alfian Nurrohman. 2010. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Basri, Yuswar Zainul. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djoko Sutarto. 2014. *Ketentuan Umum Perpajakan*, Penerbit Andi.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19* (edisi kelima.) Semarang: Universitas Diponegoro.
- Grace N. Ofoegbu, David O. Akwu dan Oliver. 2016. "Empirical Analysis of Effect of Tax Revenue on Economic Development of Nigeria". *International Journal of Asian Social Science*, Volume 6 No. 10. Hal. 604-613.
- Gujarati, Damodar. 2007. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munawir. 2000. *Pokok-pokok Perpajakan*. Liberty. Yogyakarta.
- Muhammad Tahwin. 2013. “Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah”. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 18, No. 2 Agustus 2013. Hal. 136-143.
- Mujiyati dan Aris, Muhammad Abdul. 2014. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University.
- Nadya Fazriana Haniz dan Hadi Sasana. 2014. “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal”. *Diponegoro Journal of Economics*. Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014. Hal. 1-13.
- Phany Ineke Putri. 2013. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak”. *Journal of Economics and Policy*. Volume 6 No. 2 Tahun 2013. Hal. 103-213.
- Pleanggra, Ferry dan Edy Yusuf. 2012. Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economic*, Volume 1, No. 1 Tahun 2012.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Siahaan. 2004. *Pola Pengembangan Industri*. Jakarta: Departemen Perindustrian
- Siska Lestari, Vecky A.J Masinambow dan Mauna Th. B Maramis. 2016. “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kota Manado”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16 No. 02 Tahun 2016. Hal. 306-314.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: PT Indeks.

- Tjahjono, Achmad dan Husein, Muhammad Fakhri. 2005. *Perpajakan Edisi 3*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Ulfiyah. 2015. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Kota Surabaya”. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 4 No. 11 Tahun 2015. Hal. 1-19.
- Veronika Winarti Agustiningtyas. 2003. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah”. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Yamin, Sofyan. 2009. *SPSS Complete Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS*. Salemba Infotek. Jakarta.